

ABSTRAK

Keberadaan PT. KAI (Persero) sebagai penyelenggara jasa perkeretaapian di Indonesia yang mendominasi pasar menyebabkan bisnis transportasi kereta api sulit berkembang, sehingga tidak kompetitif dan stagnan. Pelaksanaan kebijakan demonopolisasi PT KAI (Persero) bertujuan membuka peluang bagi pihak selain BUMN untuk turut melakukan usaha yang sejenis sehingga dapat menjadi pesaing BUMN dan turut berperan dalam pembangunan perekonomian negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan demonopolisasi BUMN dalam hukum Indonesia serta bagaimana dampak demonopolisasi pada BUMN seperti PT. KAI (Persero) terhadap proses bisnis dan legal jasa perkeretaapian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dengan studi literatur dan analisis regulasi terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hukum Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang demonopolisasi BUMN secara khusus. Adapun pelaksanaan demonopolisasi PT. KAI (Persero) belum berdampak signifikan, disebabkan setelah demonopolisasi belum ada produk substitusi lainnya dan PT. KAI (Persero) masih mendominasi bisnis perkeretaapian di Indonesia

Kata kunci : Demonopolisasi, PT KAI, Proses bisnis, Legal jasa